



Tinjauan Teoritis Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

(Theoretical Review of Community Development and Empowerment from The Perspective of Sustainable Development)

Nurul Chaerani¹ & Febriana Tri Wulandari^{1*}

¹ Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

* Corresponding Author: febriana.wulandari@unram.ac.id

Article History

Received : September 17, 2025

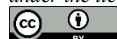
Revised : September 23, 2025

Approved : September 30, 2025

Keywords: development, empowerment, community

© 2025 Authors

Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

ABSTRACT

Community development and empowerment are two key concepts in social development that complement each other. Community development is understood as a systematic process that emphasizes improving social, economic, and institutional welfare through active community participation in planning and evaluating development. Meanwhile, community empowerment focuses more on strengthening capacity, independence, and the ability of communities to manage resources and make decisions that affect their lives. The integration of these two concepts is important for realizing inclusive and sustainable development. This study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach. Data was obtained from books, scientific journals, and policy documents related to community development and empowerment, then analyzed through content analysis to identify relevant concepts, approaches, and best practices. The results of the study show that there are various approaches that can be used, including participating in rights-based, social economy, and technology and innovation approaches. These four approaches have been proven to increase the effectiveness of development programs, particularly in the agriculture and forestry sectors. However, challenges such as limited resources, low participation, and policy inconsistencies remain obstacles that need to be overcome. This study emphasizes that community development and empowerment should not only be oriented towards improving economic welfare but also include social and ecological sustainability. Therefore, development strategies based on participation, local wisdom, and innovation are key to strengthening community independence while preserving the sustainability of natural resources.

Sejarah Artikel

Diterima : 17 September 2025

Direvisi : 23 September 2025

Disetujui : 30 September 2025

Kata Kunci: pengembangan, pemberdayaan, masyarakat

ABSTRAK

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua konsep kunci dalam pembangunan sosial yang saling melengkapi. Pengembangan masyarakat dipahami sebagai proses sistematis yang menekankan peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kelembagaan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat lebih berfokus pada penguatan kapasitas, kemandirian, serta kemampuan komunitas untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Integrasi kedua konsep ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait pengembangan serta pemberdayaan masyarakat, kemudian dianalisis melalui analisis isi guna mengidentifikasi konsep, pendekatan, serta praktik terbaik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan partisipatif, berbasis hak, ekonomi sosial, serta teknologi dan inovasi. Keempat pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan, khususnya dalam sektor pertanian dan kehutanan. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi, serta ketidakselarasan kebijakan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Kajian ini menegaskan

© 2025 Penulis

Diterbitkan oleh Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka di bawah lisensi:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup keberlanjutan sosial dan ekologi. Oleh karena itu, strategi pembangunan berbasis partisipasi, kearifan lokal, dan inovasi menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

1. Pendahuluan

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua pilar penting dalam kajian pembangunan sosial yang bertujuan menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan di tingkat komunitas. Secara konseptual, pengembangan masyarakat (community development) adalah suatu proses terencana yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang program, dan mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Ife & Tesoriero, 2006). Proses ini bersifat holistik karena mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merujuk pada upaya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengontrol sumber daya, menentukan pilihan, serta mengelola perubahan secara mandiri (Zimmerman, 2000).

Kedua konsep ini memiliki keterkaitan erat, di mana pengembangan menyediakan kerangka strategis dan infrastruktur sosial-ekonomi, sementara pemberdayaan memastikan masyarakat memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri untuk memanfaatkannya secara optimal. Pengembangan tanpa pemberdayaan berisiko menciptakan ketergantungan yang justru melemahkan kemandirian, sedangkan pemberdayaan tanpa pengembangan dapat kehilangan dukungan struktural dan arah kebijakan yang jelas (Mardikanto & Soebiato, 2017). Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi pendekatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan modern, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak lagi dipandang sebagai kegiatan sektoral, melainkan sebagai strategi multidimensional

yang mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelestarian lingkungan, serta penguatan kelembagaan masyarakat (UNDP, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan melalui partisipasi aktif semua lapisan masyarakat.

Di Indonesia, urgensi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat semakin tinggi mengingat masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi, rendahnya akses terhadap sumber daya produktif, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam (Bappenas, 2022). Program-program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Desa Mandiri Energi, hingga penguatan ekonomi berbasis potensi lokal seperti agroforestri dan ekowisata berbasis komunitas, menjadi contoh nyata implementasi integrasi kedua konsep ini. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat benar-benar terwujud dan keberlanjutan program dijaga.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi faktor internal seperti rendahnya kapasitas kelembagaan lokal, terbatasnya sumber daya manusia, serta lemahnya solidaritas sosial, dan faktor eksternal seperti keterbatasan dana, ketidakselarasan kebijakan, serta intervensi yang kurang sensitif terhadap konteks budaya lokal (World Bank, 2020). Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan yang adaptif, berbasis bukti (evidence-based), dan memanfaatkan kearifan lokal (local wisdom) sebagai landasan.

Dengan memahami teori dan prinsip pengembangan serta pemberdayaan masyarakat menjadi langkah awal yang krusial untuk

merancang intervensi yang efektif. Kajian ini akan memberikan overview teoritis yang tidak hanya menguraikan konsep dasar, tetapi juga menyoroti relevansi dan tantangan dalam implementasinya, sehingga dapat menjadi acuan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam membangun strategi pengembangan masyarakat yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen kebijakan terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Analisis dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan konsep, pendekatan, serta praktik yang relevan. Validitas dijaga dengan membandingkan berbagai sumber (triangulasi), sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell, 2018; Zed, 2014; Krippendorff, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam studi pembangunan sosial. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya suatu komunitas, sementara pemberdayaan masyarakat lebih berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mereka dapat mengendalikan kehidupan mereka sendiri secara lebih mandiri. Pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini sering kali melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, serta melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat:

1. Partisipasi aktif – Masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pembangunan.
2. Keswadayaan – Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki.
3. Kemandirian – Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal.
4. Berbasis kebutuhan lokal – Program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
5. Keberlanjutan – Program yang diterapkan harus memiliki dampak jangka panjang.

Menurut Ife (2016), pengembangan masyarakat harus berbasis pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi serta meningkatkan kontrol mereka terhadap sumber daya yang tersedia. Pemberdayaan mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan psikologis.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat:

1. Penyadaran ; Masyarakat perlu menyadari hak dan potensi mereka.
2. Pengkapasitasan ; Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
3. Aksi Kolektif ; Masyarakat mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuan bersama.
4. Evaluasi dan Keberlanjutan ; Masyarakat menilai dampak dari upaya pemberdayaan dan memastikan kesinambungannya.

Menurut Chambers (1997), pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan serta memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber daya dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menjadi landasan dalam berbagai program pengembangan masyarakat, termasuk di bidang kehutanan dan pertanian, yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat pedesaan maupun kawasan pinggiran hutan. Dalam bidang kehutanan, pemberdayaan

masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai model pengelolaan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah agroforestri, yaitu praktik menanam tanaman pertanian di antara pohon-pohon hutan sehingga masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi tanpa harus merusak ekosistem (Lasco et al., 2022). Contohnya, pola tumpang sari antara kopi dengan pohon pelindung seperti sengon atau pinus yang mampu memberikan pendapatan tambahan sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Selain itu, model Hutan Kemasyarakatan (HKm) juga menjadi bentuk nyata pemberdayaan. Melalui izin kelola dari pemerintah, masyarakat diberi hak untuk mengelola kawasan hutan dengan prinsip keberlanjutan, seperti yang dilakukan petani di Jawa yang memanfaatkan hutan pinus untuk produksi getah dan madu hutan (Suharjito et al., 2021). Pengembangan masyarakat di bidang kehutanan juga dilakukan melalui ekowisata berbasis masyarakat, di mana komunitas lokal mengelola potensi wisata alam secara mandiri. Misalnya pengembangan desa wisata hutan mangrove di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, yang tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem hutan (Pratama et al., 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi hutan menjadi strategi penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Program reforestasi dengan melibatkan penanaman pohon endemik di Kalimantan dan Sumatra menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan hutan (Yuliani et al., 2020).

Sementara itu, dalam bidang pertanian, pemberdayaan masyarakat juga memiliki peran yang signifikan. Salah satu bentuknya adalah pertanian organik, yang dikembangkan tanpa penggunaan bahan kimia sintetis, melainkan dengan pupuk dan pestisida alami. Contoh keberhasilan ini terlihat di Bali, di mana sistem pertanian organik menghasilkan beras berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor (Arifin et al., 2021). Selain itu, pertanian berbasis

kearifan lokal juga menjadi praktik yang terus dipertahankan. Sistem Subak di Bali, misalnya, menunjukkan bagaimana pengelolaan irigasi sawah secara kolektif dapat mendukung keberlanjutan produksi pertanian sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat (Windia & Dewi, 2020). Pengembangan pertanian berkelanjutan dengan pendekatan terpadu antara tanaman, peternakan, dan perikanan juga telah banyak dilakukan. Di Bogor, praktik pertanian terpadu yang menggabungkan budidaya ikan dan padi dalam satu lahan mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya (Handayanto et al., 2022). Lebih jauh lagi, pemberdayaan petani juga mencakup aspek pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, di mana petani didorong untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah sekaligus memperluas akses pasar. Contohnya dapat dilihat pada koperasi petani kopi Gayo di Aceh yang berhasil memasarkan produknya hingga ke pasar internasional (Fauzi & Rinaldi, 2021).

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian juga diwujudkan melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian. Edukasi mengenai teknik pertanian modern, penggunaan teknologi, serta manajemen usaha tani telah membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Salah satu contohnya adalah program penyuluhan hidroponik untuk petani kota di Jakarta yang berhasil mengintegrasikan teknologi pertanian modern dalam ruang perkotaan (Ramadhan et al., 2022). Dengan demikian, baik di bidang kehutanan maupun pertanian, pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

3.1. Pendekatan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Pendekatan Partisipatif. Masyarakat secara aktif terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Contoh dibidang pertanian kehutanan: Masyarakat adat dan petani hutan dilibatkan dalam program rehabilitasi hutan melalui sistem Hutan Kemasyarakatan (HKm). Mereka berperan dalam menentukan jenis pohon yang akan ditanam, menjaga kelestarian hutan, serta memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti madu hutan atau rotan. Dalam program pertanian berkelanjutan, petani diajak berdiskusi untuk menentukan jenis tanaman yang cocok dengan kondisi lahan mereka. Mereka juga berpartisipasi dalam penerapan sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming) yang menggabungkan tanaman, peternakan, dan perikanan agar lebih efisien dan ramah lingkungan.
2. Pendekatan Berbasis Hak. Memastikan bahwa masyarakat memiliki hak yang diakui dan dilindungi. Contoh dibidang pertanian dan kehutanan, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mendapatkan hak pengelolaan lahan melalui skema Perhutanan Sosial, yang memberikan izin kepada mereka untuk mengelola hutan secara lestari, tanpa harus kehilangan hak akses terhadap sumber daya alam. Petani kecil diberikan akses legal atas lahan pertanian melalui program sertifikasi tanah, sehingga mereka memiliki kepastian hukum dan bisa mengajukan pinjaman usaha ke bank untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka.
3. Pendekatan Ekonomi Sosial. Mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui koperasi, usaha kecil, dan program ekonomi berbasis komunitas. Contoh dibidang pertanian dan kehutanan, kelompok tani hutan membentuk koperasi usaha hasil hutan non-kayu, seperti produksi minyak atsiri dari daun cengkeh atau gaharu, serta pengolahan bambu untuk kerajinan tangan. Ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa harus

menebang pohon secara berlebihan. Petani didorong untuk membentuk koperasi pertanian organik, di mana mereka dapat menjual hasil pertanian langsung ke pasar atau supermarket dengan harga lebih tinggi, tanpa harus melalui tengkulak.

4. Pendekatan Teknologi dan Inovasi, memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dibidang pertanian dan kehutanan, penggunaan drones dan satelit untuk memantau kesehatan hutan dan mendeteksi potensi kebakaran hutan lebih awal, sehingga pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi kebakaran besar. Penerapan smart farming dengan menggunakan sensor IoT untuk memonitor kadar air, suhu, dan nutrisi tanah, sehingga petani bisa mengoptimalkan penggunaan pupuk dan air secara lebih efisien.

Menurut Korten (1987), pendekatan partisipatif sangat penting dalam pengembangan masyarakat karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

3.2. Pengembangan Masyarakat: Teori, Pendekatan, Dan Implementasi

Pengembangan masyarakat merupakan konsep multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Proses ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri (Midgley, 1995).

Berbagai akademisi telah memberikan definisi yang berbeda, di antaranya:

1. Midgley (1995): Pengembangan masyarakat adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.
2. Korten (1987): Pengembangan masyarakat adalah strategi pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat

dalam mengelola sumber daya dan pembangunan sosial.

3. Chambers (1997): Konsep pengembangan masyarakat harus berbasis pada kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan partisipasi aktif dari warga setempat.
4. Oakley & Marsden (1984): Menekankan bahwa pengembangan masyarakat harus memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah mereka secara mandiri.

Pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses sistematis untuk membangun kapasitas individu maupun kelompok agar mampu meningkatkan kesejahteraan bersama melalui mekanisme pemberdayaan dan partisipasi aktif (Chambers, 1997; Sen, 1999). Dalam perjalanannya, pendekatan pengembangan masyarakat mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan. Jika sebelumnya lebih banyak menggunakan pola top-down yang bersifat instruktif, kini berkembang ke arah bottom-up yang lebih menekankan partisipasi dan kemandirian masyarakat. Pergeseran ini juga sejalan dengan penekanan pembangunan pada aspek sustainable development dan human-centered development, yang menempatkan manusia sebagai pusat proses pembangunan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam (UNDP, 2020).

Dalam konteks pertanian, salah satu contoh nyata pergeseran paradigma tersebut adalah gerakan pertanian organik berbasis komunitas di Indonesia. Pada masa Revolusi Hijau, kebijakan pemerintah cenderung bersifat top-down dengan mendorong penggunaan pupuk kimia, pestisida, serta varietas unggul untuk meningkatkan produksi pangan (Fuglie & Rada, 2020). Namun, dalam perkembangannya, petani kecil mulai menginisiasi sistem pertanian organik berbasis komunitas yang lebih mandiri dan ramah lingkungan. Kelompok Tani Ngudi Makmur di Yogyakarta, misalnya, berhasil mengembangkan sistem pertanian terpadu tanpa ketergantungan pada pupuk kimia, yang tidak hanya meningkatkan

pendapatan petani tetapi juga menjaga kesehatan lingkungan (Wiyono et al., 2021).

Lebih lanjut, paradigma pembangunan berkelanjutan tercermin dalam praktik agroforestri yang semakin banyak dikembangkan di Indonesia. Agroforestri memadukan tanaman pertanian dengan pohon atau tanaman hutan, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem (Hairiah et al., 2020). Salah satu contoh implementasi nyata adalah Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang memadukan praktik pertanian dengan pelestarian hutan. Program ini terbukti mampu memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memberikan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim (Suharjito et al., 2022).

Pendekatan *human-centered development* dalam sektor pertanian juga terlihat pada program *One Village One Product* (OVOP) di Jepang. Program ini mendorong petani untuk mengembangkan produk khas daerahnya, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses pasar internasional. Petani di Prefektur Oita, misalnya, berhasil mengembangkan produk unggulan berupa teh hijau dan jamur shiitake melalui pendekatan berbasis komunitas, yang kemudian menjadi model inspiratif bagi pengembangan usaha tani berbasis koperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Murayama, 2021).

Pengembangan masyarakat di bidang pertanian juga diwujudkan melalui berbagai program lainnya, antara lain penyuluhan dan pelatihan petani. Program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (IPM) menjadi contoh penting yang membantu petani meningkatkan kapasitas dalam teknik budidaya ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan terhadap pestisida kimia (Winarto & Stigter, 2022). Lebih jauh, adopsi teknologi digital dalam pertanian juga memperkuat akses petani terhadap informasi, pasar, dan inovasi. Aplikasi seperti TaniHub dan HARA di Indonesia telah membantu petani

kecil mengakses informasi harga pasar, ramalan cuaca, serta memperluas jaringan distribusi produk pertanian (Agustina & Apriliyanti, 2021).

Sementara itu, pada bidang kehutanan, pengembangan masyarakat juga ditunjukkan melalui beberapa program berbasis partisipasi. Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) misalnya, menekankan pelibatan masyarakat lokal dalam perlindungan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Program Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia menjadi contoh nyata penerapan PHBM yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Maryudi & Myers, 2018). Selain itu, rehabilitasi hutan dan lahan kritis juga menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan masyarakat berbasis lingkungan. Gerakan rehabilitasi lahan kritis di DAS Citarum, Jawa Barat, menjadi contoh program kolaboratif yang melibatkan masyarakat dalam upaya restorasi ekosistem hutan yang rusak akibat deforestasi (Pratama et al., 2021). Tidak hanya itu, sektor kehutanan juga mulai mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat menjadi aktor utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis konservasi. Contoh keberhasilan dapat dilihat pada ekowisata di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatra, yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Rijal et al., 2020).

Dengan demikian, pengembangan masyarakat di bidang pertanian dan kehutanan tidak lagi sebatas peningkatan produksi semata, tetapi lebih luas mencakup kemandirian, keberlanjutan, dan pemberdayaan manusia sebagai pusat pembangunan. Pendekatan *bottom-up*, *sustainable development*, dan *human-centered development* terbukti semakin relevan dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di era modern.

3.3. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Menurut Midgley (1995) dan Sen (1999), pengembangan masyarakat memiliki tujuan utama yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Tujuan pertama adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui penguatan modal sosial dan akses ekonomi mampu mengurangi kemiskinan serta memperkuat resiliensi rumah tangga (Rahmawati et al., 2021).

Kedua, pengembangan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai penerima manfaat pasif, tetapi dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Partisipasi aktif ini terbukti meningkatkan efektivitas program dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal (Setiawan & Astuti, 2022). Melalui mekanisme partisipatif, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program sehingga hasil pembangunan lebih berkelanjutan.

Tujuan berikutnya adalah membangun kemandirian masyarakat. Pemberdayaan diarahkan agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan eksternal, melainkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang dimilikinya. Kemandirian menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat, di mana masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola ekonomi, sosial, dan lingkungannya secara mandiri (Iskandar et al., 2023). Dalam konteks pedesaan, penguatan kelembagaan lokal dan koperasi terbukti mampu memperkuat kemandirian ekonomi komunitas (Prasetyo & Rahman, 2021).

Terakhir, pengembangan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,

kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Model pembangunan berkelanjutan berusaha menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sekaligus memastikan keberlangsungan hidup generasi mendatang (UNDP, 2020; Nugroho & Hidayati, 2022). Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal terbukti mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis ekologis global (Wijaya et al., 2023).

Pengembangan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, partisipasi politik, kemandirian, dan keberlanjutan ekologi. Tujuan ini menegaskan bahwa pembangunan berbasis masyarakat adalah sebuah proses holistik yang menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat pembangunan.

3.4. Pengembangan Masyarakat Menuju Pemberdayaan Masyarakat dan Tantangannya

Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan, pendidikan, serta penguatan kapasitas individu maupun kelompok. Pemberdayaan sendiri bermakna memberikan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Ife, 2016; Alkire, 2021). Melalui pengembangan masyarakat yang terencana dengan baik, masyarakat dapat lebih mandiri, berdaya, dan mampu menghadapi beragam tantangan sosial maupun ekonomi (Midgley, 2014; Chambers, 2017).

Tahapan menuju pemberdayaan masyarakat diawali dengan identifikasi masalah dan potensi. Pemetaan masalah dan potensi lokal merupakan fondasi agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Cavaye & Ross, 2019). Misalnya, di sebuah desa terpencil, masyarakat menghadapi kesulitan dalam memperoleh air

bersih, padahal desa tersebut memiliki sumber mata air alami yang belum dikelola. Identifikasi semacam ini memungkinkan perancangan solusi yang tepat dan berbasis pada aset masyarakat itu sendiri (Mathie & Gaventa, 2019).

Tahap berikutnya adalah kesadaran dan pendidikan, yang berfungsi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak, kewajiban, serta peluang untuk berkembang (Freire, 2018; Oakley, 2020). Contohnya, pada program pemberdayaan petani, edukasi mengenai pertanian organik dan akses pasar dapat membantu petani keluar dari ketergantungan terhadap tengkulak (Kurniawan et al., 2021). Penyerahan ini penting agar masyarakat memiliki kesadaran kritis sekaligus kemampuan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, dilakukan pengorganisasian masyarakat, yaitu pembentukan kelompok atau organisasi yang berfungsi sebagai wadah kolektif untuk menyelesaikan persoalan bersama (Korten, 1987; Mardikanto, 2019). Misalnya, nelayan yang membentuk koperasi perikanan dapat mengelola hasil tangkapan secara lebih efisien sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka di pasar (Fitriani & Sudibyo, 2020).

Tahap berikutnya adalah peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya. Kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis, manajerial, serta perluasan akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan pemasaran (Adams et al., 2018). Contoh nyata dapat dilihat dalam program kredit mikro bagi kelompok perempuan, yang memberikan pelatihan kewirausahaan serta akses pinjaman modal kecil sehingga pendapatan keluarga meningkat (Hermanto & Astuti, 2021).

Setelah memperoleh pengetahuan dan keterampilan, masyarakat didorong melaksanakan program berbasis partisipasi. Partisipasi aktif menjamin program tidak bersifat top-down melainkan sesuai kebutuhan lokal (Chambers, 2017; Narayan et al., 2020). Misalnya, di daerah rawan banjir, masyarakat bekerja sama membangun tanggul dan sistem

drainase sebagai upaya mitigasi bencana yang berkelanjutan (Pratiwi & Nugraha, 2022). Tahapan terakhir adalah evaluasi dan keberlanjutan, yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas serta keberlangsungan program (Mardikanto, 2019). Evaluasi tidak hanya menilai pencapaian jangka pendek, tetapi juga perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas masyarakat (Eversole, 2018). Misalnya, dalam program pelestarian hutan berbasis komunitas, evaluasi lima tahun menunjukkan apakah praktik ramah lingkungan tetap dilaksanakan dan kondisi ekosistem membaik (Maryudi et al., 2020).

Namun, proses pengembangan masyarakat menuju pemberdayaan sering menghadapi tantangan. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan karena kesadaran terhadap pembangunan masih terbatas (Chambers, 2017). Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti dana dan tenaga ahli kerap menghambat program (Midgley, 2014). Ketergantungan terhadap bantuan eksternal juga sering membuat program kurang berkelanjutan (Adams et al., 2018). Tidak jarang pula hambatan sosial dan budaya, seperti norma dan tradisi, memperlambat perubahan sosial (Kurniawan et al., 2021). Pengembangan masyarakat menuju pemberdayaan membutuhkan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan strategi demikian, masyarakat dapat benar-benar mandiri, memiliki daya saing, serta mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki (Alkire, 2021; Eversole, 2018).

4. Kesimpulan

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah dua pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan berperan membangun kerangka sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sementara pemberdayaan memastikan masyarakat memiliki kapasitas, kemandirian, serta ruang partisipasi dalam setiap proses pembangunan. Integrasi keduanya melahirkan model pembangunan yang lebih

inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakselarasan kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa strategi pengembangan harus berbasis kebutuhan nyata dan kearifan lokal. Dengan pendekatan partisipatif, berbasis hak, ekonomi sosial, serta inovasi teknologi, pengembangan masyarakat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial-ekologi. Dengan demikian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan transformasi sosial yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (2018). *Critical practice in social work*. Macmillan International Higher Education.
- Agustina, R., & Apriliyanti, I. D. (2021). Digital transformation in agriculture: Opportunities and challenges for farmers. *International Journal of Agriculture and Technology*, 7(2), 101-115.
- Alkire, S. (2021). Human development and community empowerment: A multidimensional approach. *Journal of Human Development and Capabilities*, 22(4), 503–519. <https://doi.org/10.1080/19452829.2021.1894327>.
- Arifin, B., Swastika, D. K. S., & Hidayat, S. (2021). Organic farming and sustainable agriculture in Indonesia: Opportunities and challenges. *Agricultural Systems*, 190, 103121. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103121>.
- Bappenas. (2022). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Cavaye, J., & Ross, H. (2019). Community resilience and capacity building. *Australian Journal of Social Issues*,

- 54(3), 326–340.
<https://doi.org/10.1002/ajs4.61>.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Eversole, R. (2018). *Knowledge partnering for community development*. Routledge.
- Fauzi, A., & Rinaldi, M. (2021). Cooperative models for sustainable coffee production: The case of Gayo coffee farmers. *Journal of Rural Studies*, 84, 180–189.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.02.004>.
- Fitriani, E., & Sudibyoy, Y. (2020). Community-based fisheries cooperative: Enhancing fishermen's livelihood. *Marine Policy*, 119, 104050.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104050>.
- Freire, P. (2018). *Pendidikan kaum tertindas* (terj. 30th ed.). LP3ES.
- Fuglie, K., & Rada, N. (2020). The global productivity slowdown in agriculture: Evidence and drivers. *Food Policy*, 95, 101931.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101931>.
- Hairiah, K., Noordwijk, M. van, & Sari, R. R. (2020). Agroforestry and sustainable development in Indonesia. *Agroforestry Systems*, 94(5), 1245–1258.
<https://doi.org/10.1007/s10457-020-00471-2>.
- Handayanto, E., Suryadi, F. X., & Wulandari, S. (2022). Integrated farming system for sustainable agriculture in Indonesia. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 27, 56–64.
<https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2022.02.008>.
- Hermanto, Y. B., & Astuti, T. (2021). Microfinance and women's empowerment: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Rural Development*, 40(2), 213–228.
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.
- Iskandar, A., Nugroho, P., & Rahman, F. (2023). Community independence through strengthening local institutions: A rural development approach. *Indonesian Journal of Community Development*, 5(1), 1–14.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Korten, D. C. (1987). *Community management: Asian experience and perspectives*. Kumarian Press.
- Kurniawan, R., Hidayat, A., & Sari, D. (2021). Empowering farmers through market access and organic agriculture. *Journal of Sustainable Agriculture*, 13(2), 77–89.
- Lasco, R. D., Delfino, R. J. P., & Espaldon, M. L. O. (2022). Agroforestry for climate change adaptation and mitigation. *Climatic Change*, 172(3), 21–39.
<https://doi.org/10.1007/s10584-022-03345-8>.
- Mardikanto, T. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Maryudi, A., & Myers, R. (2018). Community forestry in Indonesia: Avoiding the danger of elite capture. *Forest and Society*, 2(1), 1–10.
<https://doi.org/10.24259/fs.v2i1.3518>.
- Maryudi, A., Nurrochmat, D. R., & Sahide, M. A. K. (2020). Forest governance reform in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>.

- Mathie, A., & Gaventa, J. (2019). Participatory approaches and community empowerment. *Community Development Journal*, 54(3), 405–418. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsz010>.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage Publications.
- Midgley, J. (2014). *Community practice: Theories and skills for social workers*. Routledge.
- Murayama, Y. (2021). One Village One Product (OVOP) movement and rural revitalization in Japan. *Asia Pacific Journal of Rural Development*, 31(1), 17–32. <https://doi.org/10.1177/10185291211023468>.
- Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Petesch, P. (2020). *Voices of the poor: Crying out for change*. World Bank.
- Nugroho, S. P., & Hidayati, T. (2022). Sustainable rural development in Indonesia: Challenges and opportunities. *Indonesian Journal of Sustainability*, 4(2), 145–160.
- Oakley, P. (2020). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. Routledge.
- Oakley, P., & Marsden, D. (1984). *Approaches to participation in rural development*. International Labour Organization.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, E., & Rahman, A. (2021). Strengthening rural cooperatives for community independence. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 33–45.
- Pratama, A., Hidayat, N., & Putri, M. (2021). Community-based ecotourism and mangrove forest conservation in Jakarta. *Ocean & Coastal Management*, 208, 105609. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105609>.
- Pratiwi, D., & Nugraha, F. (2022). Community-based flood mitigation: A participatory approach in rural Indonesia. *Natural Hazards*, 111(2), 1541–1563. <https://doi.org/10.1007/s11069-021-05134-0>.
- Rahmawati, L., Susilo, H., & Wahyuni, R. (2021). Social capital and poverty reduction: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Rural Social Sciences*, 36(2), 56–70.
- Ramadhan, A., Syafitri, D., & Widodo, S. (2022). Urban hydroponic farming as a sustainable livelihood strategy. *Journal of Urban Agriculture*, 10(1), 45–57.
- Rijal, S., Suryana, A., & Hidayat, R. (2020). Community-based ecotourism in Gunung Leuser National Park. *Journal of Ecotourism*, 19(4), 395–412. <https://doi.org/10.1080/14724049.2019.1702022>.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Setiawan, H., & Astuti, N. (2022). Participatory development planning in rural communities. *Journal of Development Policy*, 7(1), 67–82.
- Suharjito, D., Kartodihardjo, H., & Maryudi, A. (2021). Community forestry and social forestry programs in Indonesia: Policy and practice. *Forest and Society*, 5(1), 123–137. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.10562>
- Suharjito, D., Suryanto, P., & Maryudi, A. (2022). Agroforestry, livelihoods, and climate change mitigation: Insights from Java. *International Forestry Review*, 24(1), 56–70. <https://doi.org/10.1505/146554822834957857>.
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2021). *Sustainable Development Goals report 2021*. United Nations Development Programme.

- Wijaya, D., Putra, A., & Santoso, B. (2023). Local sustainability practices in rural Indonesia: Adaptation to climate change. *Environment, Development and Sustainability*, 25(6), 5123–5140. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02345-1>.
- Windia, W., & Dewi, I. A. (2020). Subak system as a model of sustainable agriculture in Bali. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 17(2), 1–12. <https://doi.org/10.37801/ajad2020.17.2.1>
- Winarto, Y. T., & Stigter, K. (2022). Farmer field schools and climate adaptation in Indonesia. *Climatic Change*, 170(1–2), 15–32. <https://doi.org/10.1007/s10584-021-03252-5>.
- Wiyono, S., Sumarno, & Nugroho, H. (2021). Community-based organic farming in Yogyakarta. *Journal of Organic Agriculture*, 11(3), 189–200. <https://doi.org/10.1007/s13165-021-00374-7>.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. The World Bank.
- Yuliani, E. L., Samsu, A., & Hardjanto, H. (2020). Reforestation and community participation in Kalimantan and Sumatra. *Forest Policy and Economics*, 118, 102233. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102233>.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. *Handbook of Community Psychology*, 43(2), 43–63. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2.